

**PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM MELAKSANAKAN
FUNGSI PENGAWASAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR UNTUK MENCEGAH
TERJADINYA KEGIATAN
PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.**



Diajukan Oleh:

Nama : Nanda Yuliska

Nim : 205170185

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA, 2021

**PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI
PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KEGIATAN
PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Diajukan Oleh:

Nama : Nanda Yuliska

Nim : 205170185

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

Nama : Nanda Yuliska
N.I.M : 205170185
Program Peminatan Profesi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi

PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR UNTUK MENCEGAH
TERJADINYA PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL

Disetujui Pembimbing



Dr. Rasji, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: Nanda Yuliska
N.I.M	: 205170185
Program Peminatan Profesi	: Hukum Tata Negara
Program Studi	: Sarjana Hukum
Fakultas	: Hukum

JUDUL SKRIPSI

**PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MELAKSANAKAN
FUNGSI PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KEGIATAN
PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL**

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara pada tanggal 17 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas :

1. Ketua : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Rasji, S.H., M.H.
Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., APU.

Jakarta, 22 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Rasji, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan kebijakan pemerintah daerah kabupaten belitung timur untuk mencegah terjadinya kegiatan pertambangan timah ilegal”. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi di bidang Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, maka penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. Rasji, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini sampai dengan selesainya skripsi ini.
6. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

7. Terima kasih kepada seluruh karyawan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
8. Orang tua penulis, bapak zukariwanda dan ibu misyuliani yang telah bekerja keras tanpa henti sehingga penulis dapat mencapai bangku perguruan tinggi, mendoakan, mendukung, memberikan semangat dan motivasi, agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak tercinta, Jeny agustini dan Winda yuliska dan seluruh saudara-saudara, Kakek, Nenek, Om dan Tante yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Eka hasanah, dan Vina Aulya selaku sahabat sejak semester 1 (satu) awal mula perkuliahan yang selalu ada di dalam keadaan susah karena dalam keadaan senang kami masing-masing hehe, juga telah banyak membantu memberikan berbagai motivasi dan dukungan kepada penulis, serta memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Rivaldi Hansdhanie selaku sepupu dan sebagai abang yang selalu membantu saya dalam kesulitan membuat skripsi yang selalu membimbing saya dalam situasi sesulit apapun
12. Siti danila, Yessi anisa, Nindi, Diona dan Villa selaku sahabat penulis dan teman-teman lainnya dari satu daerah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah menemani penulis selama membuat skripsi selama daring di daerah ini
13. Rembulan pitaloka selaku sahabat di Medan yang selalu menemani disaat keadaan susah maupun senang, serta selalu memberikan doa, semangat dan dukungan penuh dalam hal apapun.

14. Letda Dharma yuda Str.Han dan Letda Luthfan Aji Surya Bumi Str.Han selaku sahabat penulis yang selalu menjadi teman cerita berkeluh kesah, selalu menyemangati dan memberikan nasihat serta semangat kepada penulis dalam keadaan apapun walaupun mereka sibuk bertugas di daerah terpencil
15. Para teman-teman saya di Kep. Bangka Belitung yang tiada hentinya memberikan ucapan selamat dalam rangka hari kebahagiaan penulis, memberikan doa, dukungan dan semangat ketika penulis sedang berada di titik rendah.
16. Seluruh *Followers* di Instagram penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, yang dimana mereka telah memberikan semangat dan doa agar cepat selesainya skripsi
17. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan semangat, dukungan dan juga banyak pengalaman yang bisa diambil dari setiap hari yang kita lalui selama perkuliahan, tetap semangat untuk kita semua.
18. Para pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, terima kasih banyak atas doa dan dukungannya.

Penulis menyadari tanpa adanya peran dari mereka, skripsi ini tidak akan selesai dengan sempurna, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah penulis sebutkan di atas.

Selain untuk memenuhi persyaratan untuk menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang mengatur mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	1
BAB I.....	5
PENDAHULUAN	5
A. Latarbelakang	5
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	13
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II	26
PENGAWASAN KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA.....	26
A. Sistem Pemerintahan Pusat.....	26
1. Sistem Pemerintahan	26
B. Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia.....	31
1. Pemerintahan Daerah.....	35
2. Kewenangan Pemerintahan Daerah.....	36
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	38
4. Mekanisme <i>Check and Balances</i>	45
C. Pengawasan	47
1. Pengertian Pengawasan.....	47
2. Jenis - jenis Pengawasan.....	48
3. Lembaga – Lembaga Pengawasan.....	51
D. Kewenangan Pengawasan DPRD	54
BAB III.....	56
PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KEGIATAN PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL.....	56
A. Letak Geografis Kabupaten Belitung Timur	56

B. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.....	57
1. Sejarah	57
Tabel 3.2.....	59
2. Fungsi, Tugas Wewenang Hak dan Kewajiban DPRD Belitung Timur.....	59
3. Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Belitung Timur	62
C. Hambatan DPRD Belitung Timur dalam Melaksanakan fungsi Pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam mencegah Pertambangan Timah Ilegal.....	73
1. Hambatan Internal	73
2. Hambatan Eksternal.....	73
BAB IV	75
ANALISIS PERMASALAHAN.....	75
A. Pengawasan DPRD Kabupaten Belitung Timur	75
B. Pertambangan Timah Kabupaten Belitung Timur	79
C. Dampak Pertambangan Timah Ilegal.....	81
1. Dampak Negatif Tambang Timah.....	82
2. Dampak Positif Tambang Timah	83
D. Pencegahan Pertambangan Timah Ilegal DPRD Kabupaten Belitung Timur .	83
.....	
E. Solusi DPRD dalam melakukan Pengawasan Pertambangan Timah Ilegal .	87
BAB V	89
PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90

ABSTRAK

- (A) Nama : Nanda yuliska (NIM) 205170185
- (B) Judul skripsi : Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk Mencegah terjadinya kegiatan pertambangan timah ilegal
- (C) Halaman : ix + 103+20+2021
- (D) Kata Kunci : DPRD, Pertambangan Timah Ilegal, Pengawasan dan Pencegahan
- (E) Isi : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dapat disingkat (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenyataan bahwa seringkali kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah daerah bersama DPRD sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, posisi DPRD ditempatkan pada posisi yang strategis dan menguntungkan dalam pelaksanaan otonomi daerah pada penyelenggaraan daerah. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah. Kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut kepentingan orang yang banyak atau masyarakat umum. Kebijakan publik tersebut dilaksanakan oleh eksekutif daerah maupun lembaga – lembaga lainnya yang berkompeten. dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah tersebut peran DPRD adalah sebagai lembaga pengawas atau / *Control*, yaitu mengawasi dan mengendalikan agar kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pengawasan oleh DPRD sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada lembaga legislatif tersebut untuk lebih aktif dan kreatif dalam menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan pemerintah daerah atau dapat disebut juga dengan (PERDA). Kabupaten Belitung Timur merupakan daerah otonomi tingkat II kabupaten yang baru berbentuk yaitu Kabupaten Belitung Timur terbentuk berdasarkan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2003 sejak Februari 2003). IUP dapat diartikan yakni Izin Usaha Pertambangan, Undang – undang tersebut sudah di setujui oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, namun banyak selaku pertambangan timah ilegal yang beroperasi dikarenakan beberapa masyarakat umum tidak mengetahui dan kurang paham akan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan daerah dan DPRD, sehingga sering terjadi tindak pidana bagi pelaku yang melakukan pertambangan tanpa adanya izin usaha pertambangan (IUP) dan banyak sekali masyarakat Belitung Timur menempatkan tanah PT untuk dijadikan daerah pertambangan timah, karena itu tidak sedikit para perusahaan menuntut hak ganti rugi terkait pertambangan timah ilegal
- (F) Acuan : 20 (1983-1996)
- (G) Pembimbing : Dr. Rasji „S.H., M.H
- (H) Penulis : Nanda yuliska

DAFTAR SINGKATAN

DPRD	adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR	adalah Dewan Perwakilan Rakyat
MPR	adalah Majelis Permusyawaratan Daerah
PERDA	adalah Pemerintah Daerah
IUP	adalah Izin Usaha Pertambangan
IPR	adalah Izin Pertambangan Rakyat
APBD	adalah Anggaran pendapatan belanja daerah
UUD	adalah Undang-Undang Dasar
SIMPOR	adalah Sistem Monitoring Pembangunan Partisipatif
ALKI	adalah Alur Laut Kepulauan Indonesia